



REVISI RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**UPTD RSUD DEPATI HAMZAH
KOTA PANGKALPINANG**

• Jl. Soekarno Hatta Pangkalpinang 33143
• Telp. (0717) 422693
• Fax. (0717) 421324
• Email : depatihamzah_rsud@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.

RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mengacu pada RENSTRA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Dokumen RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan UPTD RSUD Depati Hamzah untuk satu tahun mendatang (Tahun 2025) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman UPTD RSUD Depati Hamzah.

Kami mencoba menyusun RENJA BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025, namun kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga dalam menyusun RENJA ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan dalam penyusunan RENJA yang akan datang.

Pangkalpinang, November 2024
UPTD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang
Pimpinan BLUD,



dr. DELLA RIANADITA
NIP. 19890603 201502 2 001

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA RSUD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD.....	13
2.3 Review Terhadap Ranwal dan Ranhir RKPD	27
2.4 Usulan Program dan Kegiatan RSUD.....	30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	35
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Depati Hamzah	37
3.4. Program dan Kegiatan	38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang saat ini mempunyai klasifikasi Rumah Sakit Tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 197/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 November 2007. Tugas pokok dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 477/KEP/RSUD/VIII/2010 Tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah pangkalpinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah upaya untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan rumah sakit daerah menjadi suatu lembaga yang mampu mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan serta optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan pengertian Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit tersebut juga memuat kewajiban Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan untuk melaksanakan penilaian akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Penilaian akreditasi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah dilakukan pada tahun 2022 dengan meraih predikat akreditasi paripurna berdasarkan sertifikat akreditasi Rumah Sakit Nomor: 075/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/XII/2022 dengan masa berlaku 30 November 2022 sampai dengan 29 November 2026.

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai BLUD, APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.

Selanjutnya Rencana Kerja BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Tahun 2025, akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Tahun 2025 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
 10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Tanggal 1 Juli 2021 (Berita Daerah Nomor 26);
 12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang;
 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
 14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah

Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen Rumah Sakit yang transparan, efektif dan efisien, responsif serta berkeadilan, dengan tersedianya rencana kerja sebagai pedoman arah dan tujuan yang pasti;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit;
3. Mengembangkan pola pikir sumber daya manusia dan manajemen rumah sakit kepada sikap dan tindakan yang berorientasi pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan;
4. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan pembangunan;
5. Tersusunnya Program, Rencana Kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber-sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, Tatakala Kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkan visi, dan tercapainya misi yang diinginkan pada waktu yang telah direncanakan;
6. Melakukan identifikasi dan antisipasi terhadap kelemahan, tantangan serta hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja sehingga dapat menyusun strategi pemecahan masalah dengan tepat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

- BAB II Hasil evaluasi Renja RSUD Depati Hamzah tahun 2022
Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran RSUD Depati Hamzah
Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Depati Hamzah
Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan SKPD.
- BAB V Penutup
Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan pencapaian RENSTRA Tahun 2019-2023 BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

KODE	URURAN/SIDANG URURAN PEMERINTAH DASAR DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI- ATAN (OUTPUT)/RUB- KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR RENSTRA) TAHUN 2023			REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TINGK- AT CAPAI- AN REALIS- ASI TARGE- T RENST- RA (%)
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-10/ 8	13-11 /9	14-6+ 10	15-7+11	16-15/ 5	
1.6		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan RS	100	%	3.678.857.181	100	2.878.353.660				0	100	2.878.353.660	78,24	
	4.3	Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Rumah Sakit	Biaya operasional pelayanan kesehatan RSUD yang tersedia 1 RSUD	12	bid	3.678.857.181	12	2.878.353.660				0	12	2.878.353.660	78,24	
2.2		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Tersedianya Standar Pengobatan di RS	100	%	6.499.930.000	100	4.908.083.028				0	100	4.908.083.028	75,51	
	0.8	Kegiatan akreditasi Rumah Sakit	Rumah sakit terakreditasi versi 2017	1	pts	342.630.000	1	246.989.038				0	1	246.989.038	72,09	
	0.9	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pemenuhan Standarisasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan RS	12	bid	6.157.360.000	12	4.661.094.000				0	12	4.661.094.000	75,70	
2.6		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paripara/ RS Mata	Tersedianya biaya alat-alat kedokteran	1	pkt	12.052.979.248	1	11.727.742.237				0	1	11.727.742.237	97,30	
	1.8	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat - alat kesehatan RS yang dibeli	87	Unit	12.052.979.248	81	11.727.742.237				0	81,00	11.727.742.237	97,30	
4.1		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	90	%	66.371.485.030	78,12	63.604.250.624				0	78,12	63.604.250.624	95,83	

KODE	URURAN/BIDANG URURAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI- ATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR KENSTRAS) TAHUN 2023			REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TINGK- AT CAPAIAN REALIS- ASI TARGE T KENSTR- RA (%)
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/ 8	13=11 /9	14=6+ 10	15=7+11	16=15/ 8	
0 1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Tersedianya biaya operasional HS	24	bln	58.770.098.430	24	57.240.293.133					0	24	57.240.293.133	97,40	
0 2	Pengkembangan Kesehatan Dasar Rumah Sakit	Tersedianya biaya operasional HS	12	bln	7.426.836.600	12	6.234.181.289					0	12	6.234.181.289	83,94	
0 3	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit	6	unit	129.550.000	6	129.776.202					0	6	129.776.202	74,35	
4 2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN	Tersedianya biaya pelayanan bidang kesehatan	100	%	4.325.327.814	100	3.420.755.636					0	100	3.420.755.636	79,09	
0 7	1. Peningkatan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19) Rumah Sakit Harapan	Terlaksananya penanganan dan penanganan corona virus disease (COVID-19)	116	org	4.325.327.814	116	3.420.755.636					0	116	3.420.755.636	79,09	
4 3	Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	100	%	7.583.097.000		6.449.649.787					0	0	6.449.649.787	85,05	
0 8	Pengembangan perawatan gantung baru Rumah Sakit	Jumlah bangsan gantung baru														
2 3	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	jumlah alat kesehatan RS	98	unit	5.838.961.573	79	3.733.212.360					0	79	3.733.212.360	81,63	
5 3	Pengadaan alat kesehatan Ruang Isolasi Covid 19	jumlah alat kesehatan Ruang Isolasi Covid 19	3	unit	744.135.427	3	716.437.427					0	3	716.437.427	96,28	

KODE	URUTAN/SIDANG URUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI- ATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (ANJUK RENSTRA) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA (%)		
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K		Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/ 8	13=11 /9	14=6+ 10	15=7+11	16=15/ 6		
01		PROGRAM PENUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	75	%	183.919.982.893	6.301.587.818	75	495.520.908	75	495.465.752	100	99,99	75	6.797.053.570	3,70	
	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	75	%	183.919.982.893	6.301.587.818	75	495.520.908	75	495.465.752	100	99,99	75	6.797.053.570	3,70	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	303	org	183.919.982.893	6.301.587.818	99	495.520.908	99	495.465.752	100	99,99	198	6.797.053.570	3,70	
				60	hln												
02		PROGRAM PENERUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	%	294.378.262.800	66,94	160.983.293,687	90	109.907.427,916	86,94	107.502.679.057	96,60	97,81	173,88	288.485.972.745	91,20
			Rasio Dupa Tempung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	67	%		67		67		67		100		134		
			Persentase Pelayanan Rumah Sakit yang berakut	95	%		84,6		95		84,6		89		169,3		
	201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	126.176.887.180	100	63.629.585.793	100	89.907.427.916	100	58.489.126.572	100	97,63	100	122.098.712.365	89,66
	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Peralatan Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Tingkat I/II/III yang menerima akreditasi nasional, internasional dan sertifikasi standar internasional (SFI) sesuai standar														

KODE	URUTAN/IDANG URUTAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI- ATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR RESTRAT) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TINGK- AT CAPAIAN REALIS- ASI TARGE- T RESTR- RA (%)		
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K		Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/ 8	13=11 /9	14=6+ 10	15=7+11			
	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi standar, pelayanan dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	RS/ unit	72.109.000.000	3	47.100.066.000	3	12.860.976.700	3	12.773.254.141	100	99,32	6	59.873.320.309	82,07
	13	Pengadaan Pemasangan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Pemasangan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	209	unit / per- mukaan	7.780.662.548	324	3.647.219.499	150	3.934.380.219	149	3.605.073.300	99	91,86	47,1	7.252.292.790	93,09
	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemunggang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemunggang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	102	unit	56.227.129.052	290	12.862.000.726	194	43.122.070.997	192	42.110.799.131	99	97,65	48,2	34.973.099.307	97,77
2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	158.201.476.620	100	97.373.707.894	100	50.000.000.000	100	49.013.552.485	100	98,03	100	146.387.250.380	92,53
	24	Pengadaan Upaya Penguatan Rumah Krisis Kesehatan dan Penguatan Krisis Kesehatan	Terlaksananya kegiatan penguatan krisis kesehatan	10%	unit	1.187.050.000	103	1.160.993.959						103	1.169.993.959	98,56	
	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan (bidang layanan) dalam Daerah	258	org/ dik	156.814.426.030	4	96.028.442.380	4	50.000.000.000	4	49.013.552.485	100	98,03	8	143.041.994.866	92,49
	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit	1	RS	200.000.000	1	175.271.535				0	0,00	1	175.271.535	87,64	

KODE	URUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGI ATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR KENSTRAL) TAHUN 2023			REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023						REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023		TINGK AT CAPAIAN REALIS ASI TARGE T KENSTR AL (%)
			K	Satuan	Rp	K	Rp	TARGET ANGGARAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN YANG DIEVALUASI		TINGKAT REALISASI (%)		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/ 8	13=11 /9	14=6+ 10	15=7+11	16=15/ 5	
03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100	%	4.257.215.308	100	3.364.364.443	100	256.103.772	100	256.103.754	100	100	100	3.620.468.197	85,04
	202	Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	%	4.257.215.308	100	3.364.364.443	100	256.103.772	100	256.103.754	100	100	100	3.620.468.197	85,04
	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100	org	4.257.215.308	100	3.364.364.443	50	256.103.772	50	256.103.754	100	100	200	3.620.468.197	85,04
		TOTAL			583.067.308.271		363.638.080.920		110.659.053.986		108.254.348.363		97,83		371.892.328.484	63,78

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Indikator Sasaran	Realisasi Per 31 Desember Tahun 2022	Tahun 2023			Standar Depkes
		Target	Realisasi Per 31 Desember	Pencapaian %	
BOR	36 %	70 %	45 %	64	60 - 85 %
BTO	41 kali	50 kali	51 kali	102	40 - 50 kali
LOS	3 hari	4 hari	3 hari	75	6 - 9 hari
TOI	5 hari	2 hari	4 hari	200	1 - 3 hari
SPM	84,60 %	95 %	84,40 %	89	
IKM	86,94 %	90 %	89,34 %	99	

Realisasi capaian indikator tahun 2023 dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang ditargetkan 2 (dua) indikator melebihi target yang diinginkan, 4 (empat) indikator belum memenuhi target yang diinginkan dan 4 (empat) indikator belum sesuai dengan standar Depkes. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. BOR (*Bed Occupancy Ratio*) adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit atau ratio rata-rata pemanfaatan tempat tidur yang terisi pada tahun 2023 sebesar 45 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 36 %. Capaian BOR Rumah Sakit Tahun 2023 belum memenuhi standar Depkes RI 60 – 85%. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.
2. BTO (*Bed Turn Over*) adalah rata-rata produktivitas tempat tidur/perputaran pergantian orang dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebesar 51 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 41 kali. Capaian BTO Tahun 2023 belum memenuhi standar Depkes RI 40 – 50 kali.
3. LOS (*Legth Of Stay*) adalah rata-rata lamanya pasien dirawat kurun waktu 1 tahun sebesar 3 hari, angka ini lebih rendah

dari standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 6-9 hari. Bila ratio lebih rendah dari standar yang ditetapkan maka harus adanya evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

4. TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata jumlah tempat tidur yang kosong kurun waktu 1 tahun sebesar 4 hari, angka ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1-3 hari. Bila ratio lebih tinggi dari standar yang ditetapkan maka harus adanya evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
5. Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 84,4% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 84,6 %. penjabaran dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
1	Gawat Darurat	1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %	100%	100%		
		2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 jam	24 jam		
		3 Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %	100%	100%		
		4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	ada	ada		
		5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	5 menit	4,9 menit		
		6 Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	98%	88,69%		
		7 Kematan pasien < 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	8/1000	0,001%		
		8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	100%	100%		
		9 Pasien jiwa yang ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam	100 %	-	-	Tidak ada kasus	
	Rawat Jalan	1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%		
		2 Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	Ada	Ada		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		3 Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat: 08.00 - 11.00	100%	94%	Ada beberapa dokter yang cuti dan izin mengikuti kegiatan seminar, diklat dll sehingga pelayanan di klinik tutup	1. Penambahan dokter spesialis 2. Mendatangkan dokter pengganti saat dokter cuti/izin
		4 Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	60 menit	71,1	Ada beberapa dokter spesialis yang datangnya terlambat sehingga pasien harus menunggu lama dikarenakan beberapa dokter berpraktek di tempat lain	1. Mencari dokter mitra yang bertugas di Pangkalpinang 2. Koordinasi dengan rumah sakit lain agar menyesuaikan jadwal pelayanan dokter diluar jam kerja RSUD Depati Hamzah 3. Memberikan reward bagi dokter yang disiplin dan punishment bagi dokter yang tidak disiplin. (reward dapat berupa kenaikan jasa medis per pasien, punishment berupa pemotongan tunjangan penghasilan bagi dokter yang berstatus PNS, honor bulanan bagi dokter mitra
		5 Kepuasan Pelanggan	> 90 %	85%	88,72%	Waktu tunggu yang lama	Mengatur/mendisiplinkan jam mulai pelayanan dokter di klinik sehingga tidak membuat pasien menunggu terlalu lama
		6 a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≤ 60 %	100%	32%	Penegakan diagnosa menggunakan TCM sementara microscopis hanya digunakan untuk follow up	Mengusulkan perubahan indikator SPM yang baru yaitu sesuai dengan petunjuk penatalaksanaan TB tahun 2020
		b. Tertaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60 %	100%	100%		
		7 Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa	Minimal: a. NAPZA Gangguan Psikotik c. Gangguan Neurotik d. Gangguan Organik		Tersedia		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
3	Rawat Inap	1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. dr. Spesialis	Ada	100%		
			b. Perawat minimal pendidikan D3	Ada, 99,70%	100%		
		2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100%	100%		
		3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	Ada	Ada		
			b. Penyakit Dalam	Ada	Ada		
			c. Kebidanan	Ada	Ada		
			d. Bedah	Ada	Ada		
		4 Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%		
		5 Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	1,5%	0%		
		6 Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	2%	0%		
		7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100 %	100 %	100 %		
		8 Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0.50%	2,00%	RSUD Depati Hamzah sebagai rumah sakit rujukan rerata menerima kasus rujukan dengan kondisi penyakit pasien yang berat dan datang dalam kondisi yang tidak distabilisasi terlebih dahulu di Faskes perujuk/terdekat	1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit 2. Pembuatan <i>Hospital Mortality Reduction Programme (HMRP)</i> merupakan strategi untuk memperbaiki sistem observasi klinis dengan pembuatan instrumen untuk menilai tingkat keparahan kondisi klinis pasien dan kapan intervensi diperlukan
		9 Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	7,0%	3,00%		
		10 Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	96%	90,02%		
		11 Rawat Inap TB					
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	> 60%	100 %	100 %		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%	100 %	100 %		
		12 Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa	NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik dan gangguan mental organik		Tersedia		
		13 Tidak adanya kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%		-	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus
		14 Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu < 1 bulan	100%		-	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus
		15 Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu		-	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus
4	Bedah Sentral	1 Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1 hari		
		2 Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0%		
		3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %	100 %	100 %		
		4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	100 %	100 %		
		5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	100 %	100 %		
		6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	100 %		
		7 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	1,70%	0%		
5	Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	1 Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	0% 0,01% 0%	0% 0% 0%		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada		
		3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Ada	Ada		
		4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada		
		5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	90%	100%		
		6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	15%	44%	Pasien (persalinan) yang dirujuk ke RSUD Depati Hamzah adalah pasien persalinan dengan kesulitan tertentu dan harus dilakukan persalinan dengan seksio cesaria	Sosialisasi kepada setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan ke RSUD Depati Hamzah agar dapat melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sehingga kondisi janin selalu terpantau dan agar dapat mengikuti semua anjuran dokter jika ada permasalahan kandungan.
		7 Keluarga Berencana					
		a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp. Og, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr. umum terlatih	100%	100%	100%		
		b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100%	100%		
		8 Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	90%	88,24%		
6	Intensif	1 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	1,0%	1,24%		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		2 Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis esuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	Ada 100%	88,20%	Jumlah tenaga perawat yang bersertifikat mahir ICU hanya 9 orang dari total 15 orang perawat	Usulan untuk mengikuti pelatihan perawat mahir ICU untuk perawat lainnya yang belum memiliki sertifikat
7	Radiologi	1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	3 jam	2 jam 51 menit		
		2 Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Ada, 75%	97%	Ada beberapa penyebab diantaranya adalah : 1. Dokter spesialis radiologi yang ada hanya 1 (satu) orang. Sedangkan pelayanan ekspertisi hasil rontgen harus standby 1x24 jam setiap hari. 2. Pasien yang berobat langsung pulang, sehingga hasil pemeriksaan rontgen belum terbaca.	1. Sosialisasi kepada pasien atau keluarga pasien agar menunggu hasil rontgen dibacakan dulu sebelum pasien pulang 2. Mengajukan penambahan dokter spesialis radiologi sehingga bisa dibagi shift pagi dan shift siang. N82 3. Pengadaan Picture Archiving Communication System (PACS)
		3 Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	2%	1%		
		4 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	88%	90,03%		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
8	Laboratorium Patologi Klinik	1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	120 menit	17 menit		
		2 Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Ada, 90%	Ada		
		3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100 %	100 %	100 %		
		4 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	88%	90,50%		
9	Rehabilitasi Medik	1 Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	22%	9%		
		2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100 %	100 %		
		3 Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	93%	90,40%		
10	Farmasi	1 Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi	a. ≤ 30 menit	≤ 30 menit	16,5 menit		
		b. Racikan	b. ≤ 60 menit	≤ 60 menit	27,9 menit		
		2 Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	100 %		
		3 Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	93%	88,46%		
		4 Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100%	100%		
11	Gizi	1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	97%	97,00%		
		2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	50,0%	1. Rendahnya selera pasien untuk makan dan tetap diberikannya makanan bagi pasien yang dipusakan menjelang tindak medis tertentu 2. Faktor psikologis pasien mempengaruhi asupan makan pasien	Konseling dilakukan berulang
		3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	100 %	100 %		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
12	Transfusi Darah	1 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	100%	61,00%	Stock darah yang tersedia belum mencukupi untuk semua permintaan	Mengajak semua civitas rumah sakit untuk ikut donor darah
		2 Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01 %	≤ 0,01 %	0%		
13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%		
14	Rekam Medik	1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	100%	83%	1. Tidak lengkapnya tanda tangan dokter, TBK Serah terima 2. Ketidaksiplinan petugas kesehatan dalam melakukan pengisian informed consent	Akan diberikan reward di akhir tahun terkait kelengkapan rekam medis dan pengisian rekam medis
		2 Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100%	73%	Tidak terisinya informasi tindakan ke pasien dan tanda tangan pasien dan dokter	Akan diberikan reward di akhir tahun terkait kelengkapan rekam medis dan pengisian rekam medis
		3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	10 menit	8 menit		
		4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	15 menit	13 menit		
15	Pengelolaan Limbah	1 Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 60 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	4,04 mg/l 21,20 mg/l 0 7	11,84 mg/l 31,54 mg/l 2,97 mg/l 29,8		
		2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100%	100%		
16	Administrasi dan Manajemen	1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%		
		2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%		
		3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%		
		4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%		

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
		5 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	75%	1%	Terdapat beberapa pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan pelatihan yang berbenturan waktu pelaksanaannya, tidak adanya SDM yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan tertentu, dan anggaran untuk pelatihan tidak mencukupi.	Usulan untuk mengadakan pelatihan internal maupun eksternal untuk karyawan pelatihan minimal 20 jam setahun
		6 Cost recovery	≥ 40 %	129%	80%		
		7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%		
		8 Cepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	45 menit		
		9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%		
17	Ambulance/Kereta Jenazah	1 Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam		
		2 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	a. ≤ 30 menit	≤ 30 menit	12,54 menit		
		3 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Belum Ada Perda	-	Belum Ada Perda	Belum Ada Perda
18	Pemulasaraan Jenazah	1 Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	1 Jam 30 menit		
19	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	memenuhi	97%		
		2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	90%	100%		
		3 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	100%	52%	Keterbatasan anggaran rumah sakit untuk mengkalibrasi semua alat yang ada, sehingga dana yang ada dibagi untuk mengkalibrasi alat diluar lab (termasuk urgent) sehingga peralatan di lab tidak dapat dikalibrasi seluruhnya.	Mengusulkan anggaran kalibrasi alat yang belum terkalibrasi pada tahun 2024 serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi alat secara berkala

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	RENCANA CAPAIAN 2023	CAPAIAN PER 31 Desember 2023	PENYEBAB/KENDALA	STRATEGI PENYELESAIAN
20	Pelayanan Laundry	1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	100%	100%		
		2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	100%	100%		
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1 Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %	90%	73%	Adanya pergantian staff/perawat infeksi di bagian PPI yang belum mendapatkan pelatihan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi	Usulan untuk mengadakan pelatihan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi bagi perawat baru di PPI.
		2 Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	100%	100%		
		3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	100%		

6. Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah pada tahun 2023 sebesar 89,36 % dengan uraian dibawah ini :

Tabel 2.4

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

N O	Indeks Kepuasan Masyarakat	TAHUN 2022				TAHUN 2023							
		Semester I	Indikator Mutu Pelayana n	Semester II	Indikator Mutu Pelayanan	TW I	Indikator Mutu Pelayanan	TW II	Indikator Mutu Pelayanan	TW III	Indikator Mutu Pelayanan	TW IV	Indikator Mutu Pelayanan
1	Rawat Jalan	80,30 %	B	87,13 %	A	89,90 %	A	85,58 %	B	89,90 %	A	89,50 %	A
2	Rawat Inap	83,25 %	A	92,75 %	A	89,77 %	A	89,54 %	A	90,20 %	A	90,60 %	A
3	IGD	85,91 %	A	89,60 %	A	90,00 %	A	87,96 %	B	87,51 %	B	89,30 %	A
4	ICU	80,62 %	B	89,83 %	A	91,11 %	A	87,96 %	B	91,02 %	A	87,00 %	B
5	Kamar Operasi	85,90 %	A										
6	Kebidanan	84,80 %	A	88,67 %	A	90,37 %	A	82,87 %	B	88,43 %	A	91,30 %	A
7	Laboratorium	91,15 %	A	93,10 %	A	93,22 %	A	87,41 %	B	89,17 %	A	92,20 %	A
8	Radiologi	88,70 %	A	89,90 %	A	89,78 %	A	87,04 %	B	89,91 %	A	93,10 %	A
9	Fisioterapi	85,70 %	A	89,50 %	A	90,00 %	A	90,56 %	A	89,17 %	A	91,90 %	A
10	Farmasi	84,80 %	A	87,30 %	A	90,22 %	A	84,44 %	B	90,28 %	A	88,90 %	A
11	Rekam Medis	81,85 %	A	-									
12	Galon	82,80 %	A	-									
13	Gizi	78,00 %	B	-									
	TOTAL IKM	1.093,68		807,78		814,37		783,36		805,59		813,80	
	IKM	84,13		89,75		90,49	A	87,04	B	89,51	A	90,42	A
	IKM RS		86,94				89,36						

Keterangan :

1. Sangat Baik (A) : 81,26 – 100
2. Baik (B) : 62,51 – 81,25
3. Kurang Baik (C) : 43,76 – 62,50
4. Tidak Baik (D) : 25 – 43,75

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kepuasan masyarakat di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Tahun 2023 **Sangat Baik**.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Adapun perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah adalah Kota Pangkalpinang pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal Dan Analisis Kebutuhan Tahun 2025

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD					URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp..... **)		TOTAL ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp..... **)		TOTAL ANGGARAN
		Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK			Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK	
1	2	3	4	9	10	11	2	3	4	9	10	11
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			34.350.000.000	102.839.569.023	137.189.569.023	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			40.220.720.000	40.244.150.000	80.464.870.000
1.02.01	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Pemangkat Daerah	90,22	34.000.000.000		34.000.000.000	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Pemangkat Daerah	90,22	40.000.000.000		40.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91			-		Indeks Kepuasan Masyarakat	91			-
1.02.01.2.10	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	36%	34.000.000.000		34.000.000.000	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	36%	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.01.2.10.01	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Pemangku Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Pemangku Pelayanan	1 unit	34.000.000.000		34.000.000.000	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Pemangku Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Pemangku Pelayanan	1 unit	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.02	A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	91	350.000.000	102.839.569.023	103.189.569.023	A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	91	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
		Indeks Capaian SPM	93%					Indeks Capaian SPM	93%			
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	85%					Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	85%			
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%					Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%			

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD					URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp..... **)		TOTAL ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp..... **)		TOTAL ANGGARAN
		Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK			Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK	
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	2.	3.	4.	9.	10.	11.
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	350.000.000	102.839.569.023	103.189.569.023	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
1.02.02.2.01.14	c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	150.000.000	48.069.393.023	48.219.393.023	e. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	-	16.076.850.000	16.076.850.000
1.02.02.2.01.22	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	100.000.000	43.000.000.000	43.100.000.000	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	220.720.000	24.167.300.000	24.388.020.000
1.02.02.2.01.22	b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RS	1 paket	100.000.000	11.770.176.000	11.870.176.000	b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RS	1 paket	-	-	-

2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

UPTD : RSUD Depati Hamzah

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KESUTUHAN				
		INDUKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp) _____		TOTAL ANGGARAN
		Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK	
1	2	3	4	9	10	11
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			40.220.720.000	40.244.150.000	80.464.870.000
1.02.01	A. PROGRAM PESUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90,22	40.000.000.000		40.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91			
1.02.01.2.10	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	36%	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.01.2.10.01	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.02	A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	91	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
		Indeks Capaian SPM	93%			
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	85%			
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%			
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
1.02.02.2.01.14	c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket		16.076.850.000	16.076.850.000
1.02.02.2.01.22	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Kesehatan Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	220.720.000	24.167.300.000	24.388.020.000
1.02.02.2.01.22	b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RS	1 paket			

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024:

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari :

- 1) Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- 2) Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat;
- 3) Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama;
- 4) serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis.

RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*topdown*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait

kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Pangkalpinang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2019-2023, dicanangkan Visi Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

Visi BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah **“Menjadi Rumah Sakit yang nyaman**

dan unggul dalam pelayanan”. Visi BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu RSUD Depati Hamzah sebagai Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, yang terletak di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki tujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kota Pangkalpinang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
- 4) Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perwujudan visi BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 misi, sebagai berikut:

- 1) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien.
- 2) Mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif.
- 3) Menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan *stakeholders*.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN UPTD RSUD DEPATI HAMZAH PANGKALPINANG

a. Tujuan

Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 5, tujuan yang akan dicapai BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Sasaran yang ingin dicapai oleh BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

3.4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025

Kode Program/Kegiatan/Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan		
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	210		Peningkatan Pelayanan BLUD		
		01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		
		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD	
			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
				11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD
				23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD
				17	Penyediaan Jasa Asuransi
			03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD
			04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				08	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
			05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kode Program/Kegiatan/Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan		
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD
			07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		02			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
			03		Pelayanan Nonmedik
				01	Pelayanan Farmasi
				03	Pengolahan Makanan/Gizi
				04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan
				07	Pelayanan Nonmedik Lainnya
				12	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				34	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
				36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Kode Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Program/Kegiatan/Subkegiatan		
				39	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				40	Pengadaan Bahan Habis Pakai
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	201		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota		
		05	Pengembangan rumah sakit		
		08	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit		
		14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Usulan program dan kegiatan BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat mewujudkan visi dan misi tahun 2019-2023. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
APBD dan BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp)..... **)		TOTAL ANGGARAN
		Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK	
1	2	3	4	9	10	11
1.02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			40.220.720.000	40.244.150.000	80.464.870.000
1.02.01	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90,22	40.000.000.000		40.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91			
1.02.01.2.10	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	36%	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.01.2.10.01	a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	40.000.000.000		40.000.000.000
1.02.02	A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	91	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
		Indeks Capaian SPM	93%			

KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
		INDIKATOR KINERJA		SUMBER PENDANAAN (Rp) _____ **)		TOTAL ANGGARAN
		Tolak Ukur	Target	APBD/BLUD	DAK	
1	2	3	4	9	10	11
		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	85%			
		Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	100%			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%			
1.02.02.2.01	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	220.720.000	40.244.150.000	40.464.870.000
1.02.02.2.01.14	c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	-	16.076.850.000	16.076.850.000
1.02.02.2.01.22	a. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	220.720.000	24.167.300.000	24.388.020.000
1.02.02.2.01.22	b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RS	1 paket	-	-	-

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan
Sub Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
BLUD UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2025		
				K	Rp	
00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	91	25.835.459.268	
00.01.01.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran BLUD tepat waktu	%	100	4.000.000	Bagian Tata Usaha
00.01.01.01.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	Jumlah Dokumen Perencanaan BLUD	dokumen	4	4.000.000	Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
00.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan BLUD sesuai SAK	%	100	18.292.960.268	Bagian Tata Usaha
00.01.01.02.02	Penyediaan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	34	8.773.895.000	Bagian Keuangan
00.01.01.02.09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Non ASN	orang/ bulan	230	8.732.792.560	Bagian Keuangan
00.01.01.02.11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	dokumen	1	46.969.000	Bagian Keuangan
00.01.01.02.13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Laporan	1	88.649.000	Bagian Keuangan
00.01.01.02.17	Penyediaan Jasa Asuransi	Jumlah orang yang diberikan asuransi	orang	226	650.654.708	Bagian Keuangan
00.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BLUD	%	100	6.600.000	Bagian Tata Usaha
00.01.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BLUD	Laporan	12	6.600.000	Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
00.01.01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi pendapatan BLUD terhadap Pendapatan Rumah Sakit	%	100	24.800.000	Bagian Tata Usaha
00.01.01.04.08	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pendapatan BLUD	dokumen	12	24.800.000	Bagian Keuangan
00.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	499.687.000	Bagian Tata Usaha & Bidang Keperawatan dan Pengembangan
00.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	25	499.687.000	Seksi Didat dan Pengembangan SDM

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2025		
				K	Rp	
00.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	Persentase pelaksanaan administrasi umum BLUD	%	100	1.138.258.000	Bagian Tata Usaha
00.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	101.649.000	Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
00.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	292.205.000	Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
00.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	252.205.000	Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
00.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	362.205.000	Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
00.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	129.994.000	Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
00.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	2.046.518.000	Bidang Pelayanan
00.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	40	2.046.518.000	Pelayanan Penunjang Media
00.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	2.803.519.000	Bagian Tata Usaha
00.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.031.000	Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian
00.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.507.283.000	Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
00.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.205.000	Bagian Kepegawaian
00.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.019.117.000	Bagian Tata Usaha & Bidang Pelayanan
00.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	73.085.000	Bagian Kepegawaian
00.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	81.309.000	Pelayanan Penunjang Media
00.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	552.518.000	Pelayanan Penunjang Non Media
00.01.01.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	312.205.000	Pelayanan Penunjang Non Media

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BLUD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2025		
				K	Rp	
02.01.02	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH	Indeks Capaian SPM Rumah Sakit	%	93	14.164.540.732	
02.01.02.03	Pelayanan nonmedik	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Nonmedik	%	100	14.164.540.732	Bidang Pelayanan
02.01.02.03.01	Pelayanan Farmasi	Jumlah Laporan Pelayanan Farmasi	Laporan	1	11.054.795.000	Pelayanan Penunjang Medis
02.01.02.03.03	Pengolahan Makanan/Gizi	Jumlah Dokumen hasil pengolahan makanan/gizi	dokumen	2	1.456.713.000	Pelayanan Penunjang Non Medis
02.01.02.03.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana dan alat kesehatan yang Dipelihara	unit	15	54.649.000	Pelayanan Penunjang Non Medis
02.01.02.03.07	Pelayanan Nonmedik lainnya	Jumlah dokumen hasil pelayanan nonmedik lainnya	dokumen	6	491.805.000	Pelayanan Penunjang Non Medis
02.01.02.03.12	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	dokumen	2	645.838.000	Pelayanan Penunjang Medis
02.01.02.03.34	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	13	15.000.000	Pelayanan Penunjang Non Medis
02.01.02.03.36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung Rumah Sakit yang dipelihara dan direhabilitasi	unit	2	252.214.000	Pelayanan Penunjang Non Medis
02.01.02.03.39	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang di beli dan dipelihara	unit	2	151.649.000	Pelayanan Medis
02.01.02.03.40	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Bahan Habis pakai	paket	1	41.877.732	Pelayanan Penunjang Medis
	TOTAL				40.000.000.000	

Rencana Kerja (RENJA) BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki rumah sakit dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Dengan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan di BLUD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.
